

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan uraian penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini :

1. **Hasanuddin (2018)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan kualitas audit yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komite audit, komisaris independen, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas akuntan publik. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Total sampel yang digunakan yaitu 24 perusahaan yang ditentukan melalui metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, dewan komisaris dan kualitas akuntan publik berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen *leverage* dan ukuran perusahaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

2. Ahmad Sauqi, Akram dan Endar Pituringsih (2017)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh mekanisme *corporate governance* yang ditunjukkan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, jumlah dewan direksi dan komisaris independen, independensi auditor dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Total sampel yang digunakan yaitu 75 perusahaan yang ditentukan melalui metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi dan kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen dan independensi auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada

variabel independen, dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen *leverage* dan ukuran perusahaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

3. Dade Nurdiniah dan Endra Pradika (2017)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang baik, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, reputasi Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, sedangkan penelitian saat ini menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.

4. Daniel Oscar Savero (2017)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 yang terdiri dari 128 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen *leverage* dan ukuran perusahaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

5. Anita Indrasari, Willy Sri Yuliandhari dan Dedik Nur Triyanto (2016)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas tentang pengaruh komisaris independen, komite audit dan *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel perusahaan berjumlah 17 perusahaan. Teknik

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu komisaris independen dan komite audit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah menjelaskan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dengan beberapa variabel independen lainnya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

6. Nelly Yulinda (2016)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, *leverage*, pergantian auditor dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 yang terdiri dari 135 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 14 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis

regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, *leverage* dan pergantian auditor berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan spesialisasi industri auditor terbukti tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

7. Ni Kadek Harum Sari Dewi dan I Made Pande Dwiana Putra (2016)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* pada integritas laporan keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 dan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 perusahaan dengan periode penelitian 3 tahun sehingga menjadi 72 observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan

keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen *leverage* dan ukuran perusahaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

8. Mathius Tandiontong dan Se Tin Tio (2016)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merumuskan pengaruh ukuran perusahaan akuntan publik, ukuran penerbit, kepemilikan perusahaan dan penerapan *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan akuntan publik, ukuran penerbit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit. Variabel *corporate governance* diukur dengan data primer 176 manajemen perusahaan publik di Indonesia. Variabel ukuran kantor publik, ukuran penerbit, kepemilikan perusahaan, dan integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan data dari 176 laporan keuangan perusahaan publik yang diaudit tahun 2010-2012 yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan akuntan publik, ukuran penerbit,

kepemilikan perusahaan, dan penerapan *corporate governance* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan perusahaan (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) dan mekanisme *corporate governance* (komisaris independen dan komite audit). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan publik yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah menjelaskan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dengan variabel independen lainnya yaitu ukuran perusahaan.

9. Rimi Gusliana Mais dan Fadlan Nuari (2016)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas tentang pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *leverage*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 11 perusahaan pertambangan dengan menggunakan

periode waktu empat tahun sehingga dilakukan 44 observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah menjelaskan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dengan beberapa variabel independen lainnya yaitu komite audit dan kepemilikan manajerial.

10. Atik Fajaryani (2015)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, *leverage* dan spesialisasi industri terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel perusahaan berjumlah

sembilan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage* dan spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah menjelaskan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dengan beberapa variabel independen lainnya yaitu komisaris independen dan komite audit.

11. Ghina Latifah (2015)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, *leverage* dan manajemen laba terhadap integritas laporan keuangan serta untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan melalui manajemen laba. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional,

leverage dan manajemen laba. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis path. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, *leverage*, dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan institusional dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengaruh kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap integritas laporan keuangan melalui manajemen laba mempunyai koefisien jalur yang tidak signifikan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel independen komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

12. Sofia Dinil Qoyyimah, Masyiah Kholmi, dan Gina Harventy (2015)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh struktur *corporate governance*, audit tenure dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap integritas laporan keuangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, audit tenure, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel perusahaan berjumlah 14 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, audit tenure dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Sampel penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah menjelaskan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dengan beberapa variabel independen lainnya yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan.

13. Aljufri (2014)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dan mekanisme *corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas audit dan kepemilikan institusional. Populasi dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu komisaris independen. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut :

- a) Sampel penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah menjelaskan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dengan beberapa variabel independen lainnya yaitu komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *leverage* dan ukuran perusahaan.

Berikut hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini dapat dilihat pada tabel matriks dibawah ini :

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Independen					
		KO IN	KO AU	IN ST	MA NJ	LE VR	UK PR
1	Hasanuddin (2018)	B	B	TB	B	-	-
2	Ahmad Sauqi et al. (2017)	TB	TB	TB	B	-	-
3	Dade Nurdiniah dan Endra Pradika (2017)	B	TB	TB	-	B	B
4	Daniel Oscar Savero (2017)	B	B	B	B	-	-
5	Anita Indrasari et al. (2016)	B	TB	-	-	-	-
6	Nelly Yulinda (2016)	B	B	-	-	B	-
7	Ni Kadek Harum Sari Dewi dan I Made Pande Dwiana Putra (2016)	B	TB	B	B	-	-
8	Mathius Tandiontong dan Se Tin Tio (2016)	B	B	B	B	-	-
9	Rimi Gusliana Mais dan Fadlan Nuari (2016)	B	-	B	-	B	TB
10	Atik Fajaryani (2015)	-	-	B	TB	B	B
11	Ghina Latifah (2015)	-	-	TB	-	TB	-
12	Sofia Dinil Qoyyimah et al. (2015)	TB	TB	TB	TB	-	-
13	Aljufri (2014)	-	-	B	-	-	-

Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

KOIN	: Komisariss Independen	LEVR	: <i>Leverage</i>
KOAU	: Komite Audit	UKPR	: Ukuran Perusahaan
INST	: Kepemilikan Institusional	B	: Berpengaruh
MANJ	: Kepemilikan Manajerial	TB	: Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

Landasan teori memuat teori-teori yang digunakan untuk mendukung analisis mengenai penelitian yang akan dilakukan dan yang akan dijadikan landasan penyusunan hipotesis beserta analisisnya. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak antara hubungan pemilik/pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Terdapat suatu kontrak dalam hubungan keagenan tersebut dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan terbaik bagi *principal*. Manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui mengenai informasi perusahaan baik informasi internal maupun prospek perusahaan kedepannya dibandingkan dengan pemilik/pemegang saham (*principal*). Oleh karena hal tersebut, manajer sebagai pengelola perusahaan berkewajiban untuk memberikan informasi seluas mungkin mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik/pemegang saham, namun informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pemegang saham disebut sebagai asimetri informasi (Dewi & Putra, 2016). Asimetri informasi yang terjadi antara pemilik dengan manajemen dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau memiliki integritas yang rendah.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menunjukkan ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Ketidaksamaan kepentingan yang terjadi adalah karena *agent* dalam menjalankan

perusahaan menginginkan kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya dengan cara menunjukkan kinerjanya yang baik melalui laporan keuangan yang sehat walaupun terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sedangkan *principal* menginginkan informasi yang sebenarnya terkait dengan pengembalian dana yang lebih besar dari dana yang diinvestasikan untuk pengelolaan perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Penyajian laporan keuangan yang jujur dan transparan kepada *principal* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab *agent* sebagai manajemen perusahaan yang dapat mengelola perusahaan dengan baik dan sesuai dengan keinginan para pemangku kepentingan.

Pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan menerapkan mekanisme *corporate governance*. Penerapan mekanisme *good corporate governance* ditujukan untuk mengurangi konflik agensi yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Corporate governance* diartikan sebagai segala upaya untuk mencari cara-cara terbaik dalam menjalankan perusahaan. Cara-cara terbaik ini memuat kebijakan dan peraturan yang dapat digunakan untuk mengontrol manajemen agar dapat dinilai apakah tindakannya bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan (*principal*) atau untuk menguntungkan dirinya sendiri (*agent*). Secara tidak langsung penerapan *good corporate governance* menjadi salah satu cara dalam meminimalisir adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.

2.2.2 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan yang berisi informasi keuangan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal dan eksternal. Laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan para pengguna laporan keuangan. Para pengguna internal memiliki kontak langsung dengan perusahaan dan mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perusahaan, sehingga pengguna internal memiliki tingkat ketergantungan terhadap informasi akuntansi yang tidak sebesar pengguna eksternal. Oleh karena hal tersebut, untuk menjadikan laporan keuangan dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada para pengguna, khususnya pihak eksternal, maka laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya sehingga laporan keuangan tersebut memiliki integritas yang tinggi dan dapat diandalkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan.

Wilopo (2016) menyatakan bahwa integritas tidak hanya berupa kejujuran tetapi juga sifat dapat dipercaya, bertindak adil dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Menurut Verya (2017) integritas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Fajaryani (2015) mendefinisikan integritas laporan keuangan sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan manajemen menunjukkan informasi yang benar dan jujur sehingga tidak menyesatkan para penggunanya. Informasi yang disajikan sesuai dengan kondisi

keuangan perusahaan sebenarnya merupakan salah satu karakteristik kualitatif dalam pembuatan laporan keuangan yaitu *reability*. Laporan keuangan yang memiliki kualitas *reability* dapat diartikan sebagai laporan keuangan dengan penyajian informasi yang tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar (Savero, 2017). Laporan keuangan yang dibuat dengan tidak jujur atau memiliki integritas yang rendah dapat menyebabkan pengguna salah dalam menerima informasi keuangan, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Integritas laporan keuangan dapat diukur melalui tingkat konservatisme akuntansi seperti pada penelitian Indrasari, Yuliandhari, & Triyanto (2016). Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Prinsip konservatisme seringkali melakukan penundaan kabar baik (*good news*) pada laporan keuangan, namun secepatnya mengakui kabar buruk (*bad news*). Pada penelitian Indrasari, Yuliandhari, & Triyanto (2016) konservatisme diukur dengan menggunakan model Givoly & Hayn (2000). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$CON_ACC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan :

CON_ACC = Tingkat konservatisme akuntansi

NI_{it} = Laba sebelum *extraordinary items* + depresiasi dari perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Arus kas dari kegiatan operasi perusahaan i pada tahun t

Apabila laba yang dihasilkan lebih rendah dari arus kas operasi atau terjadi akrual negatif (*net income* lebih kecil dari *cash flow operasional*) yang konsisten selama beberapa tahun atau nilai CON_ACC kurang dari 0, maka ada indikasi penerapan prinsip konservatisme. Penggunaan laba sebelum *extraordinary items* bertujuan untuk menghilangkan elemen yang menyebabkan pertumbuhan laba meningkat dalam satu periode tertentu yang tidak akan timbul dalam periode lainnya.

Dalam penelitian Fajaryani (2015) integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indeks konservatisme. Indeks konservatisme digunakan dengan alasan keindetikan konservatisme yang menyajikan laporan keuangan yang *understate* yang memiliki risiko lebih kecil dibanding laporan keuangan yang *overstate*. Pengukuran indeks konservatisme dalam penelitian Fajaryani (2015) menggunakan model Beaver dan Ryan (2000). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$ILK = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

Dalam penelitian Dewi & Putra (2016) integritas laporan keuangan dihitung dengan menggunakan indeks *conservatism* yang dikemukakan oleh Penman dan Zhang (2002). Konservatisme memiliki peran penting dalam praktik akuntansi karena dapat digunakan dalam memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan dikategorikan konservatisme apabila indeks konservatisme perusahaan *i* pada tahun *t* memiliki nilai positif. Semakin tinggi nilai indeks konservatisme menunjukkan penerapan

konservatisme yang semakin tinggi juga. Laporan keuangan dikategorikan tidak konservatisme apabila indeks konservatisme perusahaan i pada tahun t memiliki nilai negatif. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$C_{it} = \frac{(RP_{it}^{res} + DEPR_{it}^{res})}{NOA_{it}}$$

Keterangan :

- C_{it} = Indeks *conservatism* perusahaan i pada tahun t
 RP_{it}^{res} = Jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan i pada tahun t
 $DEPR_{it}^{res}$ = Biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan i pada tahun t
 NOA_{it} = *Net operating assets*, yang diukur dengan kewajiban keuangan bersih yaitu (total utang + total saham + total dividen) – (kas + total investasi) perusahaan i pada tahun t

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2015) mengukur integritas laporan keuangan dengan menggunakan konservatisme dengan asumsi *non-operating accruals* yang dikemukakan Givoly dan Hayn (2002). Apabila akrual bernilai negatif (laba yang diperoleh perusahaan lebih rendah dari *cash flow*), maka laba digolongkan konservatif. Dapat disimpulkan bahwa, semakin kecil nilai *non-operating accruals* maka semakin konservatif suatu perusahaan yang menunjukkan semakin tinggi integritas laporan keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Non-operating\ accruals = Total\ accruals - Operating\ accruals$$

Keterangan :

- Total accrual* = (laba bersih + depresiasi) – arus kas kegiatan operasi
Operating accrual = Δ piutang usaha + Δ persediaan + Δ biaya dibayar dimuka - Δ utang usaha - Δ beban yang masih harus dibayar - Δ utang pajak

2.2.3 *Corporate Governance*

Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2016). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 menyatakan bahwa *good corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. *Corporate governance* diterapkan dengan melakukan kontrol manajemen dengan jalan pengawasan yang diarahkan pada perilaku manajer agar dapat dinilai apakah tindakannya bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan atau untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dengan adanya *corporate governance*, maka pengawasan terhadap perusahaan juga akan semakin baik sehingga tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dapat diminimalkan. Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *good corporate governance* tersebut yaitu sebagai berikut :

1. *Transparansi (Transparency)*

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dengan penerapan asas *good corporate governance* diharapkan dapat mengurangi konflik agensi yang terjadi sehingga pelaku bisnis dapat menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan

stakeholders dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Dalam penelitian ini *corporate governance* terdiri dari komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

1. Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04.2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, mendefinisikan komisaris independen sebagai anggota komisaris yang bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya; berasal dari luar emiten atau perusahaan publik; tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan (Yulinda, 2016). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04.2014 tentang direksi dan dewan

komisaris emiten atau perusahaan publik, mendefinisikan tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.

Keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi, dimana dewan komisaris bertugas untuk mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan serta mewajibkan terlaksananya asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Keefektifan dari komisaris independen diharapkan akan mendorong peran komisaris dalam independensinya dan diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki tingkat integritas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya (Mais & Nuari, 2016).

Dalam penelitian Nurdiniah dan Pradika (2017) komisaris independen diukur dengan menentukan persentase jumlah komisaris independen. Pengukurannya yaitu dengan menambah semua anggota dewan komisaris independen yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dibagi dengan total dewan komisaris pada perusahaan. Jika tidak diketahui berapa jumlah anggota dewan komisaris independen di dalam laporan keuangan, maka diasumsikan perusahaan tersebut memiliki komisaris independen sebanyak satu orang, perihal ini dijelaskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014

yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan seluruh Perseroan untuk mempunyai dewan komisaris independen.

2. Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggota komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;

- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam pedoman umum *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 menyatakan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua pemegang saham dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen (Indrasari, Yuliandhari, & Triyanto, 2016). Dapat disimpulkan bahwa komite audit bersama dengan dewan komisaris akan memastikan laporan keuangan perusahaan disajikan dengan wajar sesuai dengan standar yang berlaku dan kondisi perusahaan yang sebenarnya, memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan, serta memastikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang baik.

Dalam penelitian Indrasari, Yuliandhari, & Triyanto (2016) komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan setiap tahunnya. Jika tidak diketahui berapa jumlah anggota komite audit di dalam laporan keuangan, maka diasumsikan perusahaan tersebut memiliki komite audit sebanyak tiga orang, perihal ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang menyebutkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Dalam penelitian Sauqi, Akram, & Pituringsih (2017) komite audit diukur dengan menggunakan persentase jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen dengan

seluruh jumlah komite audit. Dewi dan Putra (2016) menggunakan pengukuran komite audit dengan membandingkan jumlah komite audit terhadap jumlah komisaris.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan, asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi; 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini didukung oleh Cornett *et al* dalam Savero (2017) yang menyatakan bahwa investor institusional merupakan investor dengan kepemilikan saham yang besar sehingga kepemilikan institusional memiliki peluang, sumber daya dan kemampuan untuk mengawasi dan mempengaruhi manajemen.

Kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan karena semakin tinggi kepemilikan institusional, dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat menghalangi manajemen yang akan bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadi. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan maka manajemen akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena banyaknya investor institusional berarti bahwa perusahaan semakin berada dalam pengawasan yang ketat. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional menurut Latifah (2015) adalah dengan menghitung persentase saham

yang dimiliki oleh institusi yaitu dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional yaitu :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki manajemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi direksi dan komisaris (Fajaryani, 2015). Kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah keagenan karena kepemilikan saham oleh manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajemen. Keselarasan ini dapat terjadi dikarenakan manajemen menanamkan saham pada perusahaan yang dikelola ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang telah diambil dan manajer juga ikut menanggung risiko apabila terdapat kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham manajerial pada perusahaan yang dikelola maka semakin tinggi motivasi manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Verya (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen. Manajemen yang memiliki saham pada perusahaan yang dikelola berarti bahwa manajemen juga menempatkan diri pada posisi pemegang saham, sehingga tentunya manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan perusahaan. Perusahaan tanpa kepemilikan manajerial memiliki peluang yang

lebih besar bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang mengutamakan kepentingannya sendiri karena tidak adanya rasa memiliki pada perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional menurut Fajaryani (2015) yaitu dengan menghitung proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dengan seluruh saham yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial yaitu :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.2.4 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas (Harahap, 2015). Kasmir (2013:151) mendefinisikan *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Schiper dalam Fajaryani (2015:70) menyatakan bahwa untuk menghilangkan keraguan kreditur akan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, perusahaan perlu mengungkapkan informasi dengan integritas yang tinggi. Apabila perusahaan mempunyai hutang yang relatif tinggi, maka kreditur mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan karena

kreditur memiliki kepentingan dengan perusahaan dalam hal mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam.

Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan dalam mengukur *leverage* menurut Kasmir (2013:155-162) :

a. *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)*

Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Apabila *debt ratio* semakin tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Apabila *debt ratio* semakin rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Rumus yang digunakan untuk mencari *debt ratio* adalah :

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang

ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi perusahaan jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rumus yang digunakan untuk mencari *debt to equity ratio* adalah :

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumus yang digunakan untuk mencari LTDtER adalah :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

d. *Times Interest Earned*

Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*. Semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Sebaliknya apabila rasionya rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

e. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *times interest earned ratio*. Perbedaannya adalah rasio ini digunakan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* (FCC) adalah :

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

2.2.5 Ukuran Perusahaan

Ardi Murdoko dan Lana dalam Verya (2017) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa semakin banyak modal yang ditanamkan pada perusahaan. Semakin besar penjualan menunjukkan semakin besar perputaran uang dalam perusahaan dan semakin besar kapitalisasi pasar menunjukkan bahwa perusahaan semakin dikenal oleh masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Berikut klasifikasinya :

- a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
- b. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2.5 milyar.
- c. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar.
- d. Usaha besar memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Fajaryani (2015) menyatakan bahwa perusahaan kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, maka informasi keuangan yang dibutuhkan oleh investor guna pengambilan keputusan juga semakin banyak sehingga menuntut perusahaan untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi. Perusahaan besar juga lebih disorot oleh masyarakat sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik untuk menarik minat investor. Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan menurut Nurdiniah dan Pradika (2017) adalah

dengan menghitung logaritma natural dari total aset. Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan yaitu :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aset}$$

2.2.6 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan jajaran dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan dibentuk dengan tujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan manajemen khususnya sebagai perlindungan pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait sehingga keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kepentingan khusus. Oleh karena itu, keefektifan dari komisaris independen diharapkan dapat mendorong peran komisaris dalam independensinya dan diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki tingkat integritas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya (Mais & Nuari, 2016). Semakin banyak komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi integritas laporan keuangan yang disajikan. Hal ini dikarenakan komisaris independen dalam perusahaan bertugas mengawasi dan menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi hak-hak pihak diluar manajemen perusahaan sehingga dapat meminimalkan adanya kepentingan khusus dari pihak manajemen yang mengarah pada integritas laporan keuangan perusahaan. Berpengaruhnya

komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (2018), Nurdiniah dan Pradika (2017), Savero (2017), Indrasari, Yuliandhari & Triyanto (2016), Dewi dan Putra (2016), Yulinda (2016) dan Mais dan Nuari (2016) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit harus terdiri dari orang-orang yang independen yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari manajemen serta memiliki integritas yang tinggi, sehingga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang akan dilakukan oleh komite audit yaitu untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan perusahaan tidak menyesatkan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua pemegang saham dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen (Indrasari, Yuliandhari, & Triyanto, 2016). Oleh karena hal tersebut, semakin banyak komite audit dalam suatu

perusahaan maka semakin tinggi integritas laporan keuangan yang disajikan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa komite audit diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit dengan komisaris independen didalamnya diharapkan mampu memaksimalkan peran komite audit dalam rangka membantu dewan komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya yaitu memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang berintegritas tinggi. Berpengaruhnya komite audit terhadap integritas laporan keuangan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (2018), Savero (2017) dan Yulinda (2016) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh intitusi/lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau kepemilikan institsional lainnya. Kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham institusional dapat mendorong adanya pengawasan yang lebih besar terhadap tindakan manajemen, sehingga menghalangi manajemen yang akan bertindak dengan mengutamakan kepentingan

pribadi. Kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan dapat membuat manajemen untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, karena banyaknya investor institusional berarti bahwa perusahaan semakin berada dalam pengawasan yang ketat. Hal ini dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam mengantisipasi adanya tindakan kecurangan atau manipulasi sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Investor institusional saat ini hanya berfokus pada keuntungan yang diperoleh, sehingga menyebabkan peran investor institusional dalam fungsi pengawasan tidak dilakukan secara efektif. Investor institusional yang berfokus pada keuntungan mendorong manajemen untuk memenuhi tujuan keuntungan yang diinginkan oleh investor. Kondisi ini dapat menyebabkan manajemen melakukan berbagai upaya untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga integritas laporan keuangan menjadi rendah. Berpengaruhnya kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Savero (2017), Dewi dan Putra (2016), Mais dan Nuari (2016), Fajaryani (2015), dan Aljufri (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen pada perusahaan yang dikelola. Kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris dalam perusahaan dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer sehingga dapat mengurangi konflik keagenan. Manajemen yang memiliki saham pada perusahaan yang dikelola berarti bahwa manajemen juga menempatkan diri pada posisi pemegang saham sehingga tentunya manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan perusahaan. Perusahaan tanpa kepemilikan manajerial memiliki peluang yang lebih besar bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi karena tidak adanya rasa memiliki pada perusahaan. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham manajerial pada perusahaan yang dikelola maka semakin tinggi motivasi manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga manajemen akan melakukan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan dan menghindari tindakan kecurangan atau manipulasi yang dapat menyebabkan rendahnya integritas dalam laporan keuangan yang disajikan. Berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (2018), Savero (2017) dan Dewi dan Putra (2016) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.2.7 Pengaruh *Leverage* terhadap Integritas Laporan Keuangan

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang yang ditanggung oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Perusahaan yang mempunyai utang relatif tinggi, maka kreditur mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan karena kreditur memiliki kepentingan dengan perusahaan dalam hal mengetahui kemampuan perusahaan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam. Oleh karena hal tersebut, perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas, transparan serta memiliki integritas yang tinggi agar para pemegang obligasi perusahaan tidak ragu terhadap kinerja perusahaan dan hak-hak sebagai kreditur dapat terpenuhi.

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko finansial yang juga tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang dapat dilihat dari banyaknya utang yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Adanya risiko finansial yang tinggi dapat mengakibatkan investor menuntut untuk mendapatkan pengembalian yang besar atas dana yang diinvestasikan. Kondisi ini dapat menyebabkan manajemen melakukan berbagai upaya untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga integritas laporan keuangan menjadi rendah. Berpengaruhnya *leverage* terhadap integritas laporan keuangan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiniah dan Pradika (2017), Yulinda (2016), Mais dan Nuari

(2016), dan Fajaryani (2015) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.2.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Salah satu kelebihannya yaitu perusahaan yang berukuran besar dapat lebih mudah dalam memperoleh sumber pendanaan baik melalui investor yang menanamkan dana maupun kreditor yang memberikan pinjaman dana. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh investor maupun kreditor karena keduanya memiliki kepentingan dengan perusahaan. Investor memiliki kepentingan dengan perusahaan dalam hal mengetahui apakah dana yang telah diinvestasikan dikelola dengan baik untuk kegiatan perusahaan dan menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi investor. Kreditor memiliki kepentingan dengan perusahaan dalam hal mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan dengan informasi keuangan yang luas, transparan dan berintegritas tinggi untuk memenuhi keinginan pihak-pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan ekonomi secara tepat. Perusahaan besar juga lebih disorot oleh masyarakat dibandingkan dengan perusahaan kecil,

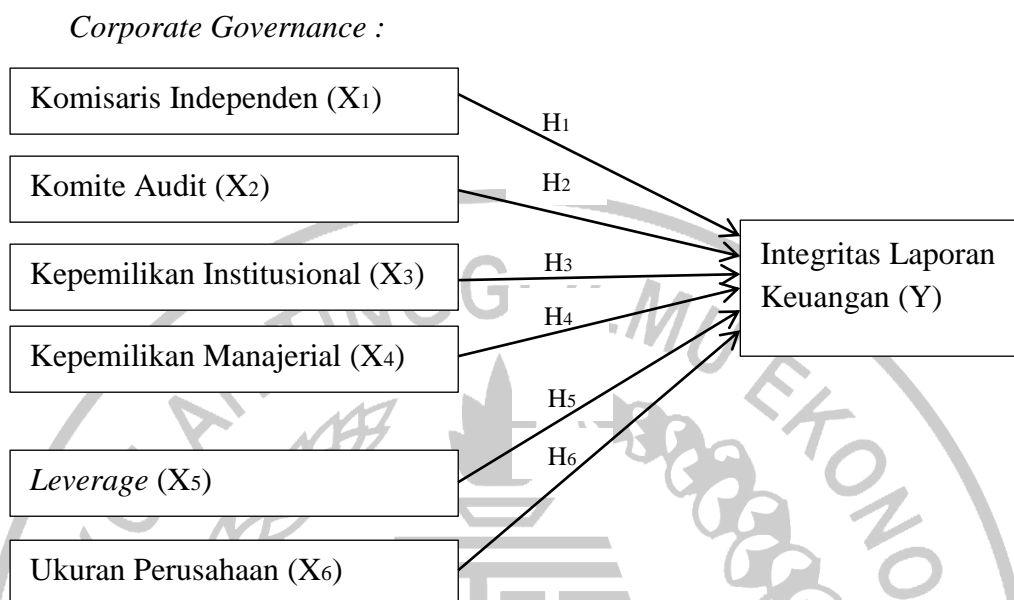
sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik untuk menarik minat investor.

Menurut beberapa penelitian terkait telah menjelaskan bukti hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdiniah dan Pradika (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajaryani (2015) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan beberapa uraian penelitian terdahulu, dalam penelitian ini *corporate governance* yang terdiri dari komisisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dengan *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang mempengaruhi integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Maka dapat dibangun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

H₁ : Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

H₂ : Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

H₄ : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

H₅ : *Leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

H₆ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan